

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ali, Achmad. 2012. "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata". Kencana. Jakarta.
- Anatami, Darwis. 2021. "Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan". Deepublish. Yogyakarta.
- Anisah, S. 2008. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. "Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek". Rineka Cipta. Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2012. "Pengantar Tata Hukum Indonesia". Jakarta. Rajawali Press.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. "Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan". Sinar Grafika. Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. "Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor". Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartini, Rahayu. 2020. "Hukum Kepailitan". UMM Press. Malang.
- Wijaya, Andika. 2017. "Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis". PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahfud MD, M. 2011. "Politik Hukum di Indonesia edisi revisi". Rajawali Pers. Jakarta.
- Manullang, Sardjana Orba, dkk. 2021. "Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi". Penerbit Insani. Cirebon.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. "Penelitian Hukum, cetakan ke-11". Kencana. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. "Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia". Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rawls, John. 1999. "A Theory of Justice, cet. Ke-23". Massachusetts: Harvard University Press.

- Reksohadiprodo dkk. 1990. "Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3". BPFE. Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. "Filsafat Hukum". Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rustamaji, Muhammad. 2017. "Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo". Thafa Media. Yogyakarta.
- Shubhan, Hadi. 2008. "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan". Kencana. Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2019. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Cetakan ke-6". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2021. "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Cetakan ke-7". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. "Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum". Mandar Maju. Bandung.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. "Hukum Kepailitan Indonesia". PT. Tatanusa. Ciputat.
- Soekanto, Soerjono. 2005. "Pengantar Penelitian Hukum". UI Press. Jakarta. p 106.
- Soeroso. 2011. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta. Sinar Grafika.
- Sunarmi. 2010. "Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia". PT. Softmedia. Jakarta.
- Tomasic, Roman. 2006. "Insolvency Law in East Asia". Ashgate Publishing Limited. Farnham.
- Vaccari, Eugenio dan Emilie Ghio. 2022. "English Corporate Insolvency Law: A Primer". Edward Elgar. United Kingdom.
- Wahab, Abdul, Sri Wahyuni Hasibuan, Ansri Jayanti, dkk. 2021. "Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis". Media Sains Indonesia. Tangerang.
- Wasis. 1978. "Pengantar Ekonomi Perusahaan". Alumni.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. "Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)". Pustaka Reka Cipta. Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D Ayat (2).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4)

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi Pasal 72.

### **Karya Ilmiah**

Alka, Reisar dan Tivana Arbiani Candini, 2022, “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”, Jurnal Gloria Justitia. Vol. 2. No. 2.

Andani, Devi. 2022. “Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia”. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 7. No. 1.

Anshari, Muhammad Redha. 2016. “Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit”. Lex Renaissance. Vol. 1. No. 1.

Ansori, Lutfil, 2017. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2.

Aprita, Serlika. 2017. “Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”. Nurani. Vol. 17. No. 2.

Arif, M. Yasin al. 2019. “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif”. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1.

Arif, Mhd. Fakhruddin, Siti Halilah. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara. Vol. 4. No. 2.

- Aulia, M. Zulfa. 2018. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Azizah, Noor. 2022. "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan". Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Besila, Charina Putri, Tazkya Salsabila, dan Shrishti. 2021. "Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia". *PROSIDING SERINA III*. Vol. 1. No. 1.
- Dimas, Rionald. 2021. "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum". *PROSIDING SERINA III*. Vol. 1. No. 1.
- Gaol, Royana Lumban, Gindo L Tobing, dan Rr. Ani Wijayati. 2021. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Hukum: to-ra*. Vol. 7.
- Handayani, Yusrina, Sitta Saraya. 2023. "Perlindungan Debitor Dalam Proses Pembebasan Boedel Pailit Di Pengadilan". *Journal Legal Dialectics*. Vol. 2. No. 1.
- Hidayah, Lili Naili. 2017. "Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1.
- Ikhwansyah, Isis dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. 2019. "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 26. No. 2.
- Laksmi, Ni Luh Gede Sri Suariyanti dan Ni Luh Gede Astariyani, 2019, "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan", *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 3.
- M., Mulyadi. 2012. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 16. No. 1.
- Mohan, M. P. Ram. 2021. "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law". IIMA Working Paper.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 13. No. 1.
- Nazra, Wahyu Apriliansyah. 2023. "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum". *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*.

- Nola, Luthvi Febryka. 2018. "Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit (Kepailitan Mafia In Sales Of Pailit Treasure)". *Jurnal DPR RI*. Vol. 23. No. 3.
- Prabaningsih, Luh ayu Maheswari dan Made Nurmawati. "Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan". Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pratama, Gede Aditya. 2021. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia". *KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 15. No. 1.
- Putri, Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin. 2018. "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". *Mimbar Yustisia*. Vol. 2. No. 2.
- Putri, Revita Pirena. Endang Prasetyawati. 2023. "Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor". *Bureaucracy Journal*. Vol. 3. No. 1.
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No. 1.
- Sarmadi, Sukris. 2012. "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 2.
- Shubhan, M. Hadi. 2014. "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 33. No. 1.
- Suardita, I Ketut. 2017. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)". *Bagian Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sukananda, Satria 2018, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Sunge, Maisara. 2012. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Inovasi*. Vol. 9. No. 2.

### Sumber Lainnya

- ADCO Law. 2021. “Insolvency Test Concerning The Bankruptcy Law Bill (part 2)”. diakses dari <https://adcolaw.com/blog/insolvency-test-concerning-the-bankruptcy-law-bill-part-2-2/>. diakses pada 23 Maret 2023.
- Agustian, Widi. 2015. “Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses”. diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses>. diakses pada 30 Maret 2023.
- Ali. 2013. “Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah”. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah-lt51eea824de1c3/>. diakses pada 13 Desember 2022.
- Darnela, Lindra. 2020, “Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review”. diakses dari [https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review#\\_ftn1](https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review#_ftn1). diakses pada 23 Januari 2023.
- Deny, Septian. 2021. “Kepailitan dan PKPU Berpotensi Hambat Pemulihan Ekonomi”. diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4651988/kepailitan-dan-pkpu-berpotensi-hambat-pemulihan-ekonomi>. diakses pada 13 Desember 2022.
- Gilang. 2020. “Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum”, diakses dari <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>. diakses pada 19 Januari 2023.
- Layanan Hukum UNS. Diakses dari <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Don%20e%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses pada 15 Februari 2023.
- Legalku. 2020. “Jenis-Jenis Kreditur”, diakses dari <https://www.legalku.com/jenis-jenis-kreditur/#!>. diakses pada 16 Februari 2023
- Mahanakorn Partners Group. 2021. “Bankruptcy & Insolvency Procedures in Thailand”. diakses dari <https://mahanakornpartners.com/bankruptcy-insolvency-procedures-in->

thailand/#:~:text=The%20Thai%20Bankruptcy%20Act%20defines,betwee  
n%20secured%20and%20unsecured%20creditors. diakses pada 21 Maret  
2023.

Naku, Kristianto. 2020. “Haruskah Keadilan Lahir dari Hukum?”. diakses dari  
<https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-keadilan-lahir-dari-hukum-1253>.  
diakses pada 19 Januari 2023.

Sandi, Ferry. 2020. “Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa?”.  
diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>, diakses pada  
tanggal 23 Oktober 2022.

Susanto, Vendy Yhulia. 2022. “Sepanjang Tahun 2021, Jumlah Perkara PKPU  
Meningkat”. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat>, diakses pada tanggal 23  
Oktober 2022.

Tri. 2004. “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan”.  
diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan-ho19604?page=all#!>,  
diakses pada 30 Maret 2023.

Wibisono, Yusuf. 2020. “PN Surabaya Pailitkan Hotel Bahtera, Dirut Polisikan  
Kreditur Fiktif”. diakses dari <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/pn-surabaya-pailitkan-hotel-bahtera-dirut-polisikan-kreditur-fiktif/>. diakses  
pada 30 Maret 2023